

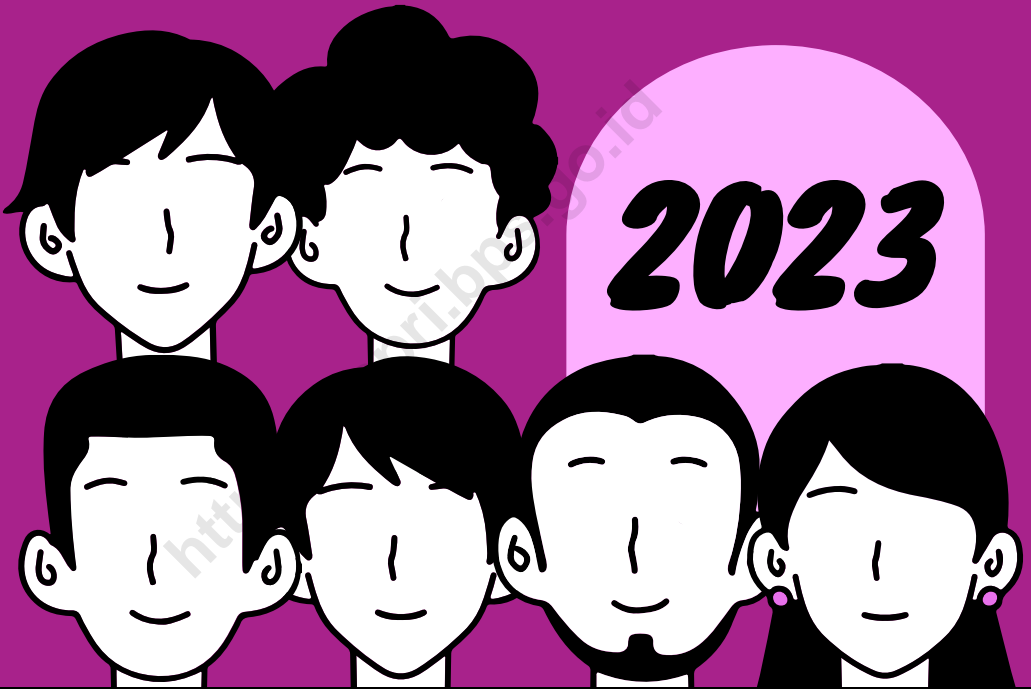
Katalog: 4102002.21

ISSN 2776-5539

Indeks Pembangunan Manusia

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Volume 5, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Katalog: 4102002.21

ISSN 2776-5539

Indeks Pembangunan Manusia

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Volume 5, 2024

2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA

Provinsi Kepulauan Riau 2023

Volume 5, 2024

Katalog: 4102002.21

ISSN: 2776-5539

Nomor Publikasi: 21000.24015

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii+78 halamann

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Tim Penyusun

"Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Riau 2023"

Volume 5, 2024

Pengarah

Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab

Dr. Agus Muslim, SST, M.Stat

Penyunting

Nunik Sri Rahayu, SST, M.Si

Selvy Ristyandari

Pengolah Data

Nunik Sri Rahayu, SST, M.Si

Utary Hafiza, SST

Dian Ariyanti

Penulis Naskah

Nunik Sri Rahayu, SST, M.Si

Utary Hafiza, SST

Fenny Afifatul Awwaliyah, S.Tr.Stat

Penata Letak

Utary Hafiza, SST

Infografis

Ismiana Putri, SST

Pembuat Kover

Ismiana Putri, SST

Kata Pengantar

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023” merupakan publikasi yang disajikan berkala setiap tahun. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai capaian dan perkembangan pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau hingga tingkat kabupaten/kota.

Data yang digunakan sebagian besar bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023. Selain itu, digunakan juga data yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) keadaan Agustus 2023 (utamanya terkait ketenagakerjaan).

Publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan akademisi dalam menyusun strategi kebijakan daerah guna mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan yang menempatkan penduduk sebagai fokus utamanya.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, disampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan dampak nyata untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang berkualitas dan sejahtera.

Tanjungpinang, Mei 2024
Kepala BPS
Provinsi Kepulauan Riau



Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

Daftar Isi

"Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023"

Volume 5, 2024

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
1. Konsep dan Urgensi Pembangunan Manusia.....	1
1.1 Sejarah Pembangunan Manusia.....	3
1.2 Mendefinisikan Pembangunan Manusia.....	4
1.3 Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan.....	5
1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia.....	6
1.5 Pembangunan Manusia dan Tujuan Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan.....	9
2. Pengukuran Pembangunan Manusia.....	11
2.1 Perkembangan Pengukuran Pembangunan.....	13
2.2 Perkembangan Pembangunan Manusia di Dunia dan Indonesia.....	16
2.3 Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia di Indonesia.....	19
2.4 Updating Sumber Data Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.....	22
3. Capaian Pembangunan Manusia Kepulauan Riau.....	25
3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau.....	27
3.2 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Tumbuh	32
3.3 Capaian Dimensi Pengetahuan.....	34
3.4 Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Mulai Meningkat...	37
4. Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota.....	41
5. Profil Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota.....	53
Lampiran.....	69
Daftar Pustaka.....	77

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
5.1 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Karimun, 2023.....	56
5.2 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Karimun, 2022–2023.....	56
5.3 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Bintan, 2023.....	57
5.4 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan, 2022–2023.....	58
5.5 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Natuna, 2023.....	59
5.6 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna, 2022–2023.....	60
5.7 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Lingga, 2023.....	61
5.8 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Lingga, 2022–2023.....	62
5.9 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2023.....	63
5.10 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Kep. Anambas, 2022–2023.....	64
5.11 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kota Batam, 2023.....	65
5.12 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kota Batam, 2022–2023.....	66
5.13 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kota Tanjungpinang, 2023.....	67
5.14 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kota Tanjungpinang, 2022–2023.....	68

Tabel	Halaman
6.1 <i>Sampling Error</i> Beberapa Indikator, 2023.....	68
6.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023.....	68

<https://kepri.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1 Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP.....	16
Gambar 2.2 Perkembangan Implementasi Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.....	19
Gambar 2.3 Pembaruan Sumber Data IPM, 2023.....	23
Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2023	28
Gambar 3.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023.....	30
Gambar 3.3 Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023.....	30
Gambar 3.4 Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (tahun), 2020–2023	33
Gambar 3.5 Pertumbuhan per Tahun UHH saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023	33
Gambar 3.6 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (tahun), 2020-2023.....	35
Gambar 3.7 Pertumbuhan per Tahun Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023	36
Gambar 3.8 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (tahun), 2020–2023.....	37
Gambar 3.9 Pertumbuhan per Tahun Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2023	38
Gambar 3.10 Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (juta rupiah), 2020–2023	39

Gambar 3.11	Pertumbuhan per Tahun Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023.....	40
Gambar 4.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023.....	44
Gambar 5.1	Perkembangan IPM Kabupaten Karimun, 2020–2023..	55
Gambar 5.2	Pertumbuhan IPM Kabupaten Karimun, 2021–2023 (persen).....	55
Gambar 5.3	Perkembangan IPM Kabupaten Bintan, 2020–2023.....	57
Gambar 5.4	Pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan, 2021–2023 (persen).....	57
Gambar 5.5	Perkembangan IPM Kabupaten Natuna, 2020–2023...	59
Gambar 5.6	Pertumbuhan IPM Kabupaten Natuna, 2021–2023 (persen).....	59
Gambar 5.7	Perkembangan IPM Kabupaten Lingga, 2020–2023.....	61
Gambar 5.8	Pertumbuhan IPM Kabupaten Lingga, 2021–2023 (persen).....	61
Gambar 5.9	Perkembangan IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2020–2023	63
Gambar 5.10	Pertumbuhan IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2021–2023 (persen).....	63
Gambar 5.11	Perkembangan IPM Kota Batam, 2020–2023	65
Gambar 5.12	Pertumbuhan IPM Kota Batam, 2021–2023 (persen)...	65
Gambar 5.13	Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang, 2020–2023..	67
Gambar 5.14	Pertumbuhan IPM Kota Tanjungpinang, 2021–2023 (persen).....	67

1

Konsep dan Urgensi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran standar pembangunan manusia yang ditetapkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Development Programme (UNDP)



Konsep dan Urgensi Pembangunan Manusia

1.1 Sejarah Pembangunan Manusia

Sejarah pembangunan manusia mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada pandangan kuno, pembangunan manusia hanya berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Hal tersebut memiliki tujuan agar manusia dapat bertahan dan melanjutkan hidupnya (Sen, 1999). Pada abad pertengahan, pembangunan manusia lebih terfokus pada kemajuan spiritual dan moral dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat (Alatas, 1977). Selanjutnya, pembangunan manusia lebih condong pada kemajuan intelektual. Pada abad modern awal, pembangunan manusia mulai terpusat pada kemajuan ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup manusia (Sen, 1999). Namun, saat ini pembangunan manusia semakin berkembang dan memperluas pandangannya untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan keadilan sosial (UNDP, 2022).

Adapun ide dasar pembangunan manusia bermula dari manusia, kesempatan, dan pilihan. Pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani oleh masyarakat. Pembangunan manusia pada prinsipnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, sehingga harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberikan kesempatan. Pembangunan manusia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati pilihannya, bukan memaksa mereka memanfaatkannya. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal.

1.2 Mendefinisikan Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber daya, dan keamanan. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara merata, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep ini telah diakui secara internasional dan digunakan oleh berbagai organisasi untuk mengukur kemajuan pembangunan di berbagai negara (UNDP, 2016). Pembangunan manusia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dimana setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesejahteraan (Haq, 1995).

Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga turut serta dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, serta perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan kesejahteraan manusia tidak hanya bergantung pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi (UNDP, 2018). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, upaya untuk mencapai pembangunan manusia harus diletakkan di tengah-tengah keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi (UNDP, 2018).

1.3 Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan

Pembangunan manusia diartikan sebagai perluasan pilihan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya (Sen, 1990). Konsep ini mengemuka sebagai alternatif dari indikator pembangunan yang hanya mengukur kemajuan ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Pada konsep pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

Perluasan pilihan individu terjadi ketika seseorang memiliki kemampuan untuk memilih cara hidup yang diinginkannya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan. Dalam konteks pembangunan manusia,

perluasan pilihan ini didukung oleh peningkatan akses terhadap sumber daya seperti air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan dari pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan dengan memperluas pilihan mereka dalam mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (UNDP, 2015).

1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Development Programme (UNDP)* menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi pengetahuan, sedangkan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan digunakan untuk mengukur standar hidup layak.

IPM menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan dari sisi manusia. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Secara kontekstual, perkembangan IPM menunjukkan perubahan pilihan-pilihan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam

konteks pengambilan kebijakan, IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro pemerintah dan DPR. IPM bersama dengan indikator pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, pertumbuhan investasi, kemiskinan, rasio gini, inflasi, dan pengangguran juga menjadi indikator penting dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Pemerintah terus mengevaluasi kemajuan KEM untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai koridor yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, dalam konteks penganggaran pembangunan, IPM digunakan sebagai salah satu variabel dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain IPM, variabel lain yang digunakan dalam penentuan DAU adalah jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam mendanai pembangunan daerah.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah semakin bergairah menuju ke arah yang lebih baik. Namun perlu disadari, perubahan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan tetapi

secara bertahap sesuai dengan proses kebijakan yang berjalan. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan yang bermuatan kearifan lokal, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Seperti contoh wilayah perkotaan yang sarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih tinggi dibanding daerah lain di sekitarnya. Daya tarik kota membawa dampak pada berpindahnya penduduk yang berkualitas ke kota. Sebagai konsekuensinya, daerah penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan yang relatif rendah.

Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, barangkali perlu dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antarwilayah, khususnya pada level provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kesadaran akan demokrasi, desentralisasi menjadi salah satu pilihan dalam upaya menggerakkan roda pembangunan. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkota dan kabupaten.

1.5 Pembangunan Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals (SDG's)* adalah sebuah rencana aksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi sebagai tempat tinggal manusia, dan memastikan bahwa semua orang memperoleh keadilan dan kemakmuran yang layak (United Nation, 2015). SDG's terdiri dari 17 tujuan yang secara komprehensif mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan-tujuan tersebut menetapkan prioritas-prioritas global seperti mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki lingkungan hidup. Pembangunan manusia merupakan bagian integral dari SDG's dan merupakan tujuan yang berada pada inti dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Manusia membawa konsep bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan peningkatan kualitas hidup masyarakat .

Untuk mencapai tujuan SDG's sekaligus mendorong pembangunan manusia, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan SDG's memerlukan kolaborasi yang kuat di semua tingkat. Pembangunan manusia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan dukungan pemerintah yang kuat untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan PBB tentang SDG's, mempromosikan pembangunan manusia

yang berkelanjutan memerlukan langkahlangkah konkret seperti memberikan akses yang lebih luas dan merata pada sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan dan keberhasilan pencapaian tujuan SDG's.

<https://kepri.bps.go.id>

2

Pengukuran Pembangunan Manusia

IPM dibentuk oleh
tiga dimensi dasar



01

Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi ini dapat dilihat dari
Umur Harapan Hidup saat lahir
(UHH)



02

Pengetahuan

Dimensi ini dapat dilihat dari
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

03



Standar Hidup Layak

Dimensi ini dapat dilihat dari
Pengeluaran per kapita yang
d disesuaikan

Pengukuran Pembangunan Manusia

2.1 Perkembangan Pengukuran Pembangunan

Pada era sebelum tahun 1970, Todaro dan Smith (2003) mengungkapkan bahwa paradigma pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi. Perhatian dunia pada saat itu berfokus pada diskusi mengenai pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai hal yang terkait dengan ekonomi. Namun, dalam perkembangannya menyebabkan munculnya fenomena sosial yang cenderung bertolak belakang dengan fenomena ekonomi. Data empiris menunjukkan bahwa beberapa negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menghadapi masalah tingginya pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia. Banyak pihak mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi jaminan terhadap perbaikan taraf hidup penduduk di suatu negara.

Munculnya fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya terdapat dua alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, angka pendapatan nasional memang bermanfaat untuk banyak tujuan tetapi tidak mengungkapkan penerima hasilnya. Kedua, penilaian kinerja yang hanya didasarkan pada indikator pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut,

seperti akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi pekerjaan yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan politik.

Konsep pembangunan yang kurang komprehensif dengan hanya berfokus pada aspek ekonomi memunculkan pemikiran baru dalam melihat pembangunan. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan melihat pembangunan secara lebih komprehensif. Konsep pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Konsep pembangunan manusia kali pertama diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report (HDR)*. Dalam laporannya, UNDP menekankan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan dasar tersebut, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya sebagai input dari pembangunan. Oleh karena itu, dalam sudut pandang pembangunan manusia, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

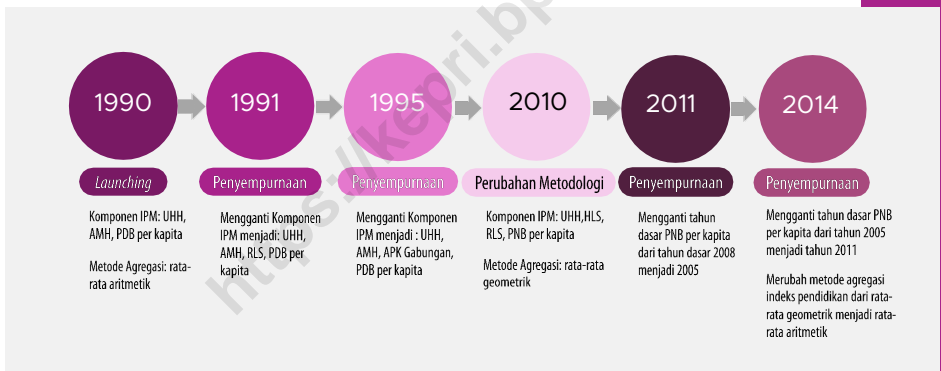
Gagasan pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP pada tahun 1990 memberikan pemahaman baru tentang cara pandang melihat pembangunan. Cara pandang pembangunan

manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat atau kebutuhan dasar manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia, tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi, atau sebaliknya.
- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Kedua pendekatan berfokus pada sisi penawaran yang memandang manusia sebagai sumber daya untuk menghasilkan produksi. Akan tetapi, manusia memiliki nilai yang lebih dari sekadar barang modal untuk kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.
- Pendekatan kesejahteraan masyarakat lebih memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai agen di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.
- Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia

2.2 Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia di Dunia dan Indonesia

UNDP menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada kali pertama IPM dirilis, ketiga dimensi tersebut diwakili dengan tiga indikator dalam penghitungan, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan rata-rata aritmetik.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.1 Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan, UNDP melakukan penyempurnaan terhadap penghitungan IPM. UNDP tercatat telah lima kali melakukan penyempurnaan sejak kali pertama dirilis. Tahun 2010, UNDP melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap penghitungan IPM dengan tetap mempertahankan tiga dimensi yang sama tetapi mengubah indikator yang digunakan. Agregasi Angka Melek Huruf (AMH)

dan Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi agregasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara itu, PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain perubahan pada indikator, UNDP juga mengubah penghitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmetik menjadi rata-rata geometrik.

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan bahwa suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan relevan. Selain itu, terdapat dua hal mendasar yang menjadi alasan utama perubahan metodologi penghitungan IPM. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat lagi digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi menjadi indikator perkembangan pendidikan karena kurang menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum revisi penghitungan pada tahun 2010, AMH di sebagian besar negara sudah tinggi sehingga tidak mampu membedakan tingkat pendidikan antarnegara dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, indikator yang tidak sensitif dalam membedakan akan menyebabkan indeks komposit menjadi tidak relevan. Dengan pertimbangan tersebut, indikator AMH perlu diganti dengan indikator lain yang representatif. Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran yang lebih relevan tentang dimensi pendidikan dan perubahannya.

Indikator berikutnya yang diganti adalah PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan pendekatan terhadap pendapatan masyarakat. Namun, konsep mendasar dalam penghitungan adalah PDB diciptakan dari seluruh faktor

produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat. Penggunaan PNB yang menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, karena hanya memperhitungkan faktor produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam negeri.

Kedua, penggunaan rata-rata aritmetik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi tertutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Sementara itu, konsep mendasar dalam pembangunan manusia adalah pemerataan dimensi dan menghindari ketimpangan antardimensi. Penggunaan rata-rata aritmetik memungkinkan adanya transfer penilaian dalam capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah, sehingga perlu diganti dengan rata-rata geometrik. Penggunaan rata-rata geometrik tidak serta merta dapat menutupi kekurangan pada suatu dimensi dengan dimensi lain yang unggul. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang merata diperlukan keseimbangan antardimensi yang sama pentingnya.

Sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang dipromosikan oleh UNDP, Indonesia mulai melakukan penghitungan IPM pada tahun 1996. Saat itu IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 1999, Indonesia menghitung IPM sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan dilakukan untuk periode data 1996 dan 1999, kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2002 untuk data 2002. Sejak tahun 2004, IPM dihitung secara berkala setiap

tahun sampai dengan level kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan, terutama dalam penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Sejak tahun data 2014, Indonesia mengaplikasikan metode penghitungan IPM yang diperbarui UNDP pada tahun 2010 dan untuk memenuhi ketersediaan data tahun sebelumnya dilakukan backasting untuk periode data 2010-2013.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.2 Perkembangan Implementasi Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia

2.3 Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia di Indonesia

Sejak kali pertama dirilis IPM pada tahun 1990, UNDP menggunakan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut adalah:

- Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);
- Pengetahuan (knowledge); dan
- Standar hidup layak (decent standard of living).

Penghitungan IPM yang dilakukan di Indonesia mengacu pada ketiga dimensi tersebut. Ketika UNDP melakukan perubahan dan penyempurnaan metode penghitungan IPM, Indonesia juga turut mengadopsi metode tersebut dengan mengacu pada penyempurnaan yang dilakukan oleh UNDP. Penghitungan yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini mengadopsi metodologi yang direvisi UNDP pada tahun 2014.

UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator pada dimensi standar hidup layak. Akan tetapi, data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah sehingga digunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai alternatif. Indikator ini dapat dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi. Adapun dalam penghitungan indeks pengeluaran digunakan batasan nilai maksimum dan minimum masing-masing Rp26.572.352 dan Rp1.007.436. Data rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, dan data harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Penggunaan umur

harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penghitungan UHH dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation). Standardisasi nilai UHH dilakukan dengan konversi menjadi indeks harapan hidup yang dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum UHH yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

Dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sementara rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Penghitungan indeks pendidikan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama. Adapun dalam penghitungan indeks HLS dan

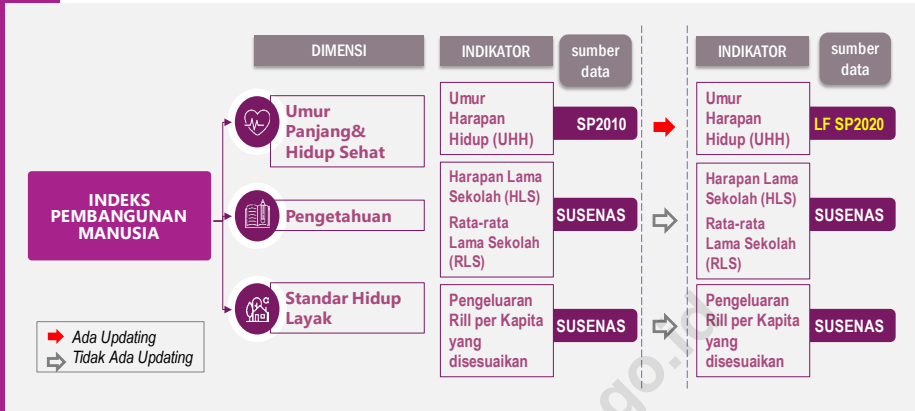
RLS digunakan batasan nilai maksimum dan minimum yang sama dengan standar UNDP. Nilai maksimum dan minimum untuk HLS masing-masing 18 tahun dan 0 tahun, sementara nilai maksimum dan minimum untuk RLS masing-masing 15 tahun dan 0 tahun. Sumber data yang digunakan untuk menghitung indikator HLS dan RLS adalah hasil Susenas bulan Maret serta data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama dan hasil inventarisasi data sektoral di daerah.

2.4 Updating Sumber Data Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Pada tahun 2023, terdapat pembaruan sumber data dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu indikator Umur Harapan Hidup (UHH) pada dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat. Sementara untuk indikator-indikator lainnya tidak terdapat pembaruan (updating) sumber data, baik pada dimensi Pengetahuan maupun Standar Hidup Layak.

Beberapa urgensi pembaruan sumber data, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan karakteristik demografi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
2. Penggunaan statistik yang terbaru akan meningkatkan kualitas data.
3. Tersedianya data parameter kependudukan terbaru (Hasil LFSP2020).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.3 Pembaruan Sumber Data IPM, 2023

Pada penghitungan UHH sebelumnya menggunakan sumber data dasar dari Sensus Penduduk 2010, dimana peningkatan UHH diukur dengan peningkatan capaian kesehatan setiap tahunnya berdasarkan sumber data Survei (seperti SUSENAS) dan data pendukung sektoral lainnya. Namun seiring dengan perkembangan data, dengan telah dilaksanakannya pendataan Long Form Sensus Penduduk 2020 (LFSP2020), maka dilakukan updating sumber data penghitungan UHH dengan hasil yang lebih terkini dan berdasarkan jumlah sampel yang lebih besar yaitu dari hasil LFSP2020.

Pada tahun 2023, telah dirilis angka IPM menggunakan UHH LF SP2020 dari tahun 2020-2023 (dilakukan *backcasting* dari 2020), dengan pertimbangan karena sudah tersedianya data UHH terbaru hasil LF SP2020 yang lebih berkualitas dan konsisten dengan proyeksi penduduk 2020-2025. Selain itu, juga dirilis

angka IPM menggunakan UHH SP2010 yang meneruskan *series* data tahun-tahun sebelumnya untuk mengakomodir kebutuhan evaluasi pembangunan dalam dokumen perencanaan. Dalam publikasi ini, data yang digunakan untuk analisis dan pembahasan adalah data IPM menggunakan UHH LF SP2020. Sedangkan IPM menggunakan UHH SP2010 hanya ditampilkan dalam lampiran.

<https://kepri.bps.go.id>

3

Capaian Pembangunan Manusia Kepulauan Riau



Indeks Pembangunan Manusia
Kepulauan Riau Tahun 2023 **79,08**

1. UHH Tahun 2023
74,90

2. HLS Tahun 2023
13,05

3. Pengeluaran Riil Perkapita
Tahun 2023
14.998

4. RLS Tahun 2023
10,41

Capaian Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

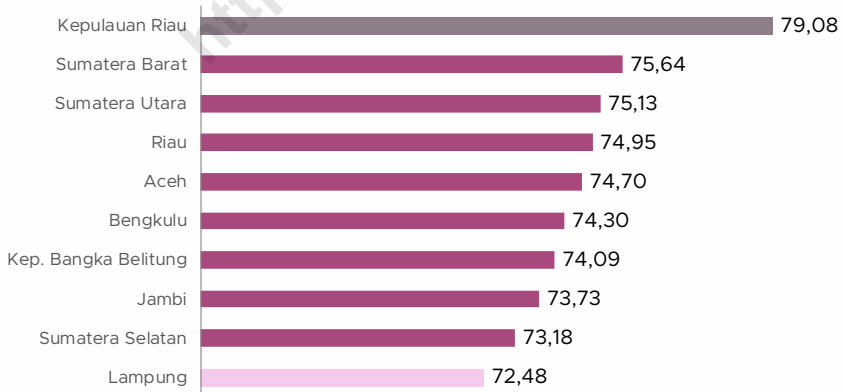
Posisi Kepulauan Riau

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$). Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2023 termasuk dalam kategori tinggi. Capaian ini menghantarkan Kepulauan Riau berada pada posisi ke tiga dari seluruh provinsi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 79,08 dimana angka IPM tersebut merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat (melalui indikator Umur Harapan Hidup), pengetahuan (melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah), serta standar hidup layak (melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Umur harapan hidup (UHH) Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 74,90, berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk hidup hingga 74,90 tahun. Lebih lama 0,28 tahun dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2022.

Rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS) masing-masing sebesar 10,41 dan 13,05. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,41 menunjukkan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,41 tahun, meningkat 0,04 tahun dibandingkan kondisi tahun 2022. Sementara itu, harapan lama sekolah sebesar 13,05 menunjukkan adanya harapan baru bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun, lebih lama 0,06 tahun dibandingkan kondisi tahun 2022. Terakhir, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 14,998 juta rupiah per tahun, meningkat 529 ribu rupiah dibandingkan tahun 2022.

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa IPM Kepulauan Riau menduduki posisi teratas di regional Sumatera jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera.



Sumber : Badan Pusat Statistik

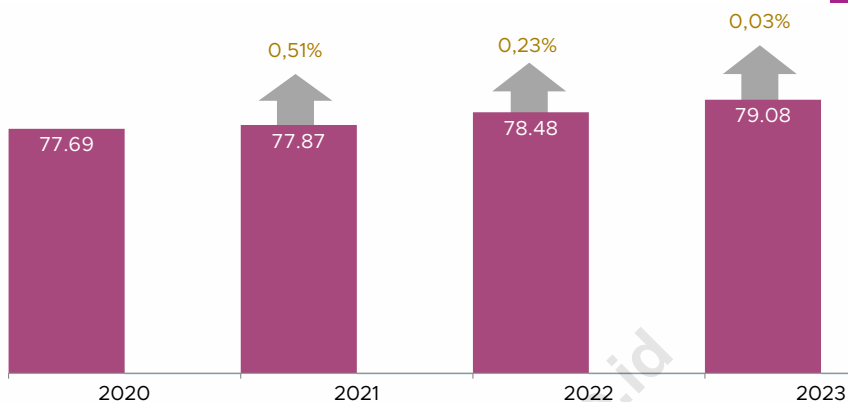
Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2023

Hal tersebut menjadi kebanggaan mengingat Kepulauan Riau tergolong provinsi baru namun mampu bersaing dengan provinsi yang sudah lebih lama terbentuk. Sementara IPM terendah di regional Sumatera adalah Provinsi Lampung. Seluruh provinsi di pulau Sumatera memiliki IPM dengan kategori tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Terus Meningkat

Pembangunan manusia Kepulauan Riau selama periode 2020–2023 semakin membaik. BPS mencatat angka IPM Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 77,69 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Posisi terakhir angka IPM Kepulauan Riau tahun 2023 mencapai 79,08. Angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin membaik.

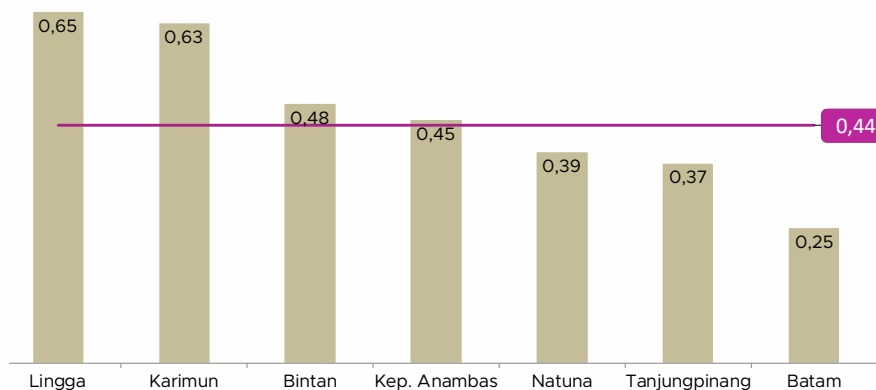
IPM sebagai tolak ukur pembangunan manusia dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan manusia di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain. Kemajuan dalam pembangunan manusia memiliki dua perspektif. Pertama adalah pencapaian yang menggambarkan apa yang telah dicapai. Capaian yang lebih besar berarti menunjukkan adanya kemajuan yang lebih baik. Kedua adalah kecepatan perubahan pembangunan manusia. Kecepatan menunjukkan besarnya perubahan pembangunan yang berhasil dicapai dalam suatu rentang waktu tertentu.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023

Dari Gambar 3.2. terlihat bahwa pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,51 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,03 persen. Pola perkembangan angka IPM kabupaten/kota di Kepulauan Riau secara umum sama dengan IPM Kepulauan Riau yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.3 Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023

Selama periode 2020-2023, terdapat 4 (empat) kabupaten yang pertumbuhan IPM nya diatas pertumbuhan IPM Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sementara itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam dibawah pertumbuhan IPM Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga sebagai kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,65 persen, sedangkan Kota Batam sebagai kota dengan pertumbuhan terendah mengalami pertumbuhan sebesar 0,25 persen.

Adapun rata-rata pertumbuhan IPM per tahun (2020-2023) mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,65 persen, Kabupaten Karimun sebesar 0,63 persen, Kabupaten Bintan sebesar 0,48 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,45 persen, Kabupaten Natuna sebesar 0,39 persen, Kota Tanjungpinang sebesar 0,37 persen, dan Kota Batam sebesar 0,25 persen.

Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Terbukti bahwa wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibanding wilayah dengan capaian yang sudah tinggi.

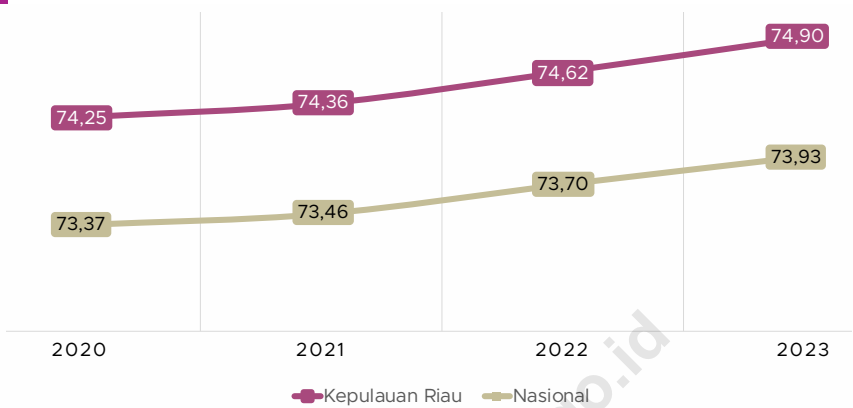
3.2 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Tumbuh

Kesehatan merupakan investasi penting bagi manusia. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat manusia tidak dapat melakukan aktivitas dengan keadaan tubuh yang tidak sehat. Untuk itu, dewasa ini telah banyak berkembang ilmu kesehatan dalam hal mendukung manusia untuk tetap sehat sehingga peluang hidup lebih panjang semakin tinggi.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat dapat diukur dengan harapan hidup saat lahir (e_0). Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah. Umur harapan hidup saat lahir mengandung arti harapan hidup seorang bayi yang baru lahir. Semakin tinggi umur harapan hidup saat lahir maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pula derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam periode 2020-2023, capaian dimensi umur panjang dan sehat Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, UHH saat lahir Kepulauan Riau tumbuh sebesar 0,22 persen setiap tahunnya. UHH saat lahir Kepulauan Riau sudah berada di atas angka nasional.

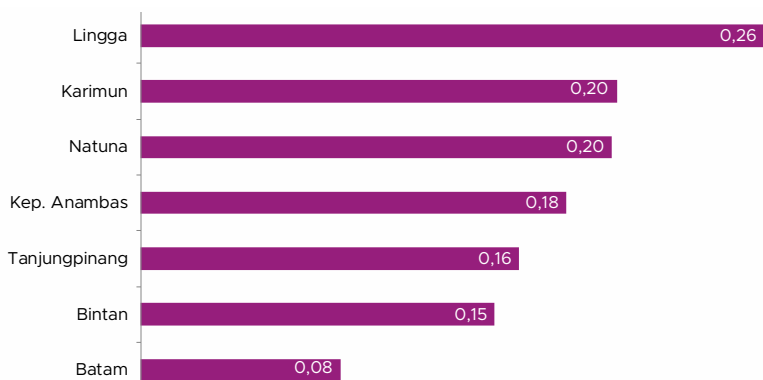
Harapan hidup saat lahir Kepulauan Riau tahun 2023 mencapai 74,90, artinya bayi yang lahir hidup pada tahun 2023 di Kepulauan Riau mempunyai peluang untuk hidup hingga 74,90 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,28 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat Kepulauan Riau tahun 2023 mengalami percepatan daripada tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 0,38 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.4 Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (tahun), 2020–2023

Secara spasial, kondisi umur harapan hidup saat lahir kabupaten/kota di Kepulauan Riau tahun 2020–2023 juga mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, pertumbuhan umur harapan hidup masing-masing kabupaten/kota bervariasi antara 0,08 persen sampai dengan 0,26 persen. Pertumbuhan umur harapan hidup tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan bersama.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.5 Pertumbuhan per Tahun UHH saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023

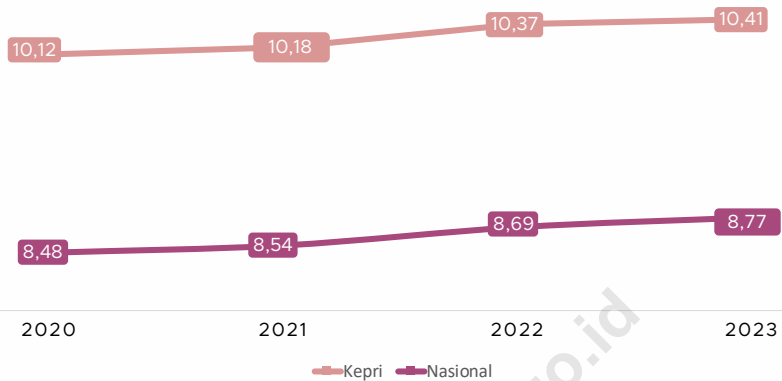
Kabupaten Lingga dengan angka UHH terendah ternyata memiliki pertumbuhan UHH yang lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lingga dalam mengejar ketertinggalan kesehatan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Sementara itu, Kota Batam yang mempunyai nilai UHH tinggi, pertumbuhan UHHnya lebih lambat.

3.3 Capaian Dimensi Pengetahuan

Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Pendidikan yang tinggi, akan memberikan peluang seseorang untuk mendapatkan kesehatan dan pekerjaan yang layak yang semakin terbuka lebar.

Dimensi pengetahuan dalam kaitannya dengan penghitungan IPM didekati dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS yang dicakup adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menjalani pendidikan formal, sedangkan HLS adalah jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Semakin tinggi angka RLS dan HLS maka pembangunan manusia dari sisi pengetahuan semakin baik pula.

Selama periode 2020-2023, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,71 persen. Rata-rata lama sekolah di Kepulauan Riau

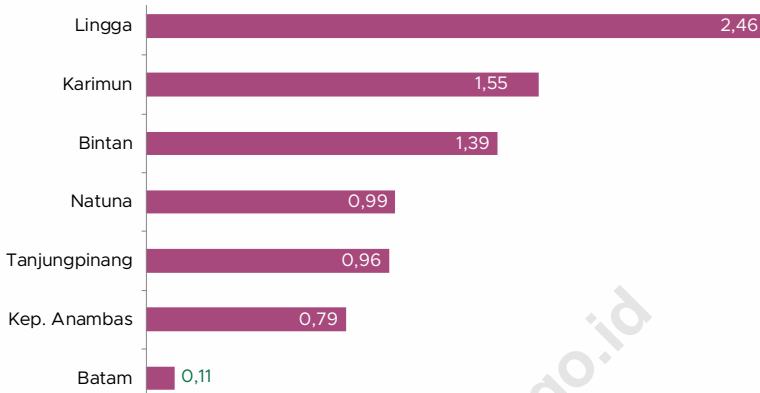


Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.6 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (tahun), 2020–2023

tahun 2023 mencapai 10,37, artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 10,41 tahun. Angka RLS Kepulauan Riau selalu berada di atas angka RLS nasional.

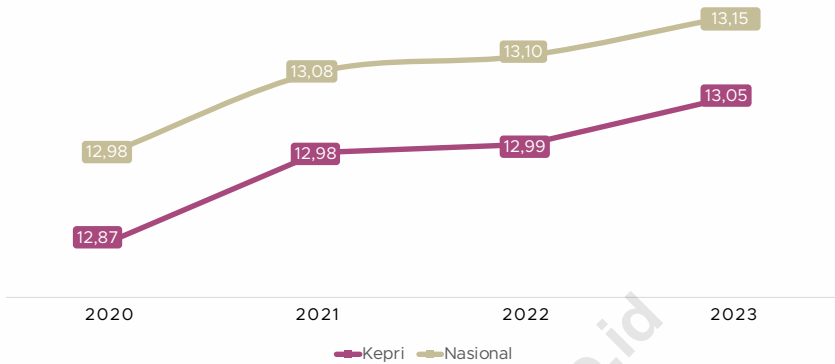
Secara umum, pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di kabupaten/kota memiliki pola yang sama dengan Provinsi Kepulauan Riau. Selama kurun waktu 2020–2023, rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten/kota di Kepulauan Riau terus meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Lingga, dimana selama empat tahun terakhir rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas tumbuh sebesar 0,68 tahun atau 2,46 persen per tahunnya, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kota Batam sebesar 0,05 tahun atau 0,11 persen per tahunnya. Melambatnya pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kota Batam karena tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kota Batam relatif sudah baik.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.7 Pertumbuhan per Tahun Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023

Selain RLS, HLS juga menggambarkan tingkat pengetahuan. Harapan lama sekolah di Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020–2023, harapan lama sekolah di Kepulauan Riau tumbuh sebesar 0,18 tahun atau tumbuh 0,35 persen per tahunnya. Harapan lama sekolah di Kepulauan Riau tahun 2023 mencapai 13,05, artinya penduduk usia 7 tahun di Kepulauan Riau memiliki peluang untuk bersekolah hingga 13,05 tahun. Dibandingkan angka nasional, HLS Kepulauan Riau masih berada di bawah angka nasional.



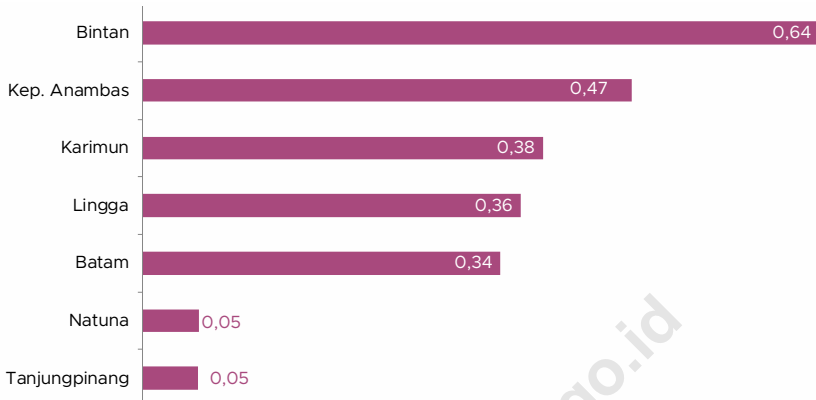
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.8 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (tahun, 2020–2023)

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pertumbuhan per tahun HLS selama periode 2020–2023 berkisar antara 0,05 hingga 0,64 persen. Pertumbuhan HLS tertinggi terjadi di Kabupaten Bintan dengan pertumbuhan selama empat tahun terakhir mencapai 0,34 tahun atau 0,64 persen per tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Bintan mempunyai harapan lama sekolah yang semakin membaik setiap tahunnya. Adapun pertumbuhan HLS terendah selama tujuh tahun terakhir terjadi di Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang, dengan angka pertumbuhan sebesar 0,05 persen per tahunnya.

3.4 Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Mulai Meningkatkan

Dimensi terakhir pembentuk IPM adalah dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Perluasan pilihan penduduk dari sisi ekonomi dapat dilihat dari pendapatan penduduk yang didekati dengan pengeluarannya.

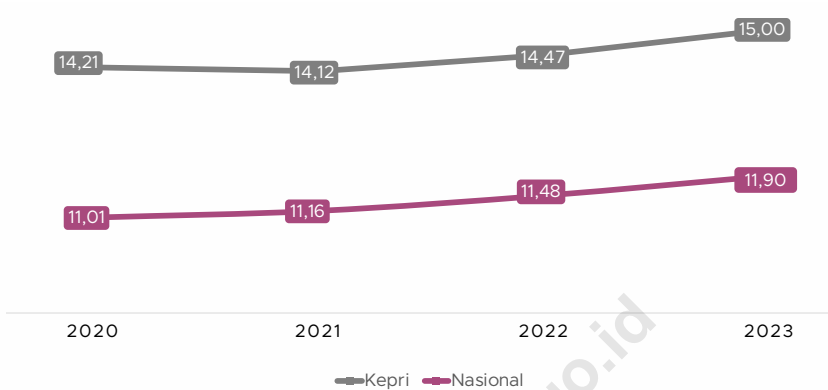


Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.9 Pertumbuhan per Tahun Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023

Penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi akan mempunyai pilihan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan pendapatan rendah atau penduduk miskin. Oleh karena itu IPM mengungkap pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai salah satu indikator pembangunan manusia yang mewakili dimensi standar hidup layak.

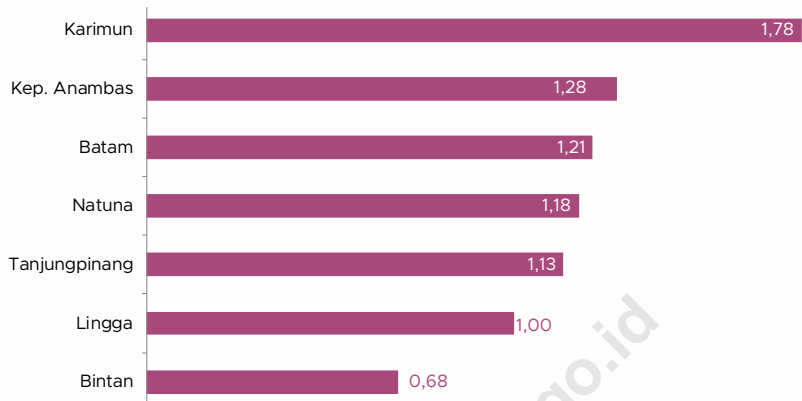
Pengeluaran riil per kapita disesuaikan Kepulauan Riau selama periode 2020-2023 selalu berada di atas angka nasional. Pengeluaran per kapita disesuaikan tahun 2020 sebesar Rp 14,21 juta per tahun mengalami penurunan menjadi Rp 14,12 juta per tahun pada 2021. Penurunan tersebut sebagai dampak Pandemi Covid-19. Namun, seiring dengan pemulihan perekonomian, pengeluaran riil per kapita disesuaikan mulai meningkat menjadi Rp. 14,47 juta per tahun pada tahun 2022 dan Rp. 15,00 juta per tahun pada tahun 2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.10 Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (juta rupiah), 2020–2023

Pengeluaran riil per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota cukup variatif namun secara umum mempunyai pola yang sama dengan perkembangan pada tingkat provinsi. Selama kurun waktu 2020-2023, Kabupaten Karimun mengalami peningkatan pengeluaran per kapita tertinggi di Kepulauan Riau, mencapai 871 ribu atau tumbuh sebesar 1,78 persen tiap tahunnya. Sedangkan Kabupaten Bintan menjadi kabupaten dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita terendah selama empat tahun terakhir, yaitu sebesar 400 ribu atau meningkat 0,68 persen per tahunnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.11 Pertumbuhan per Tahun Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023

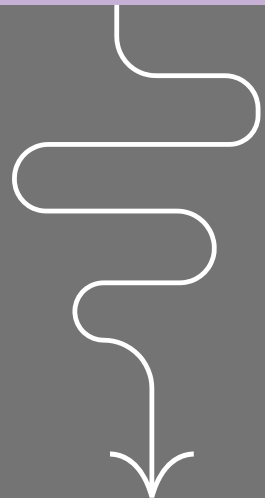
4

Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota



Kota Batam memiliki
angka IPM **tertinggi**
di Provinsi Kepulauan Riau
82,64

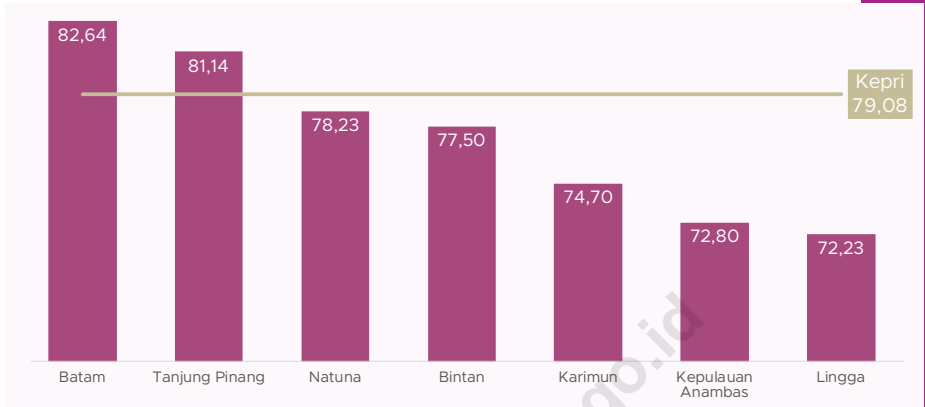
Kabupaten Lingga memiliki
angka IPM **terendah**
di Provinsi Kepulauan Riau
72,23



Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau tahun 2023 mencapai 79,08 dan telah berstatus “tinggi”, sedangkan capaian IPM di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Capaian pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata.

Capaian IPM kabupaten/kota tertinggi di Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah Kota Batam dengan angka IPM mencapai 82,64 atau berstatus “sangat tinggi”. Kemudian di posisi kedua yang berhasil mencapai status IPM “sangat tinggi” adalah Kota Tanjungpinang. Sementara itu, capaian IPM Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga berada pada status “tinggi”. Capaian IPM terendah di Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Lingga dengan angka IPM sebesar 72,23.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota ditunjukkan oleh Gambar 4. Pembangunan manusia Kota Batam dan Kota Tanjungpinang lebih baik dari Provinsi Kepulauan Riau secara umum. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka IPM kedua kota tersebut yang berada di atas angka IPM Provinsi Kepulauan Riau. Sebaliknya, lima kabupaten lainnya memiliki angka IPM di bawah angka provinsi yaitu Kabupaten Natuna dengan angka IPM 78,23, Kabupaten Bintan dengan angka IPM 77,50, Kabupaten Karimun dengan angka IPM 74,70, serta Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga masing-masing dengan angka IPM 72,80 dan 72,23.

Pencapaian pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM bukan semata-mata hanya diukur dari tingginya capaian IPM saja, namun juga perlu dikaji lebih dalam lagi sejauh mana kecepatan pembangunan manusia pada suatu periode tertentu.

Proses pencapaian pembangunan manusia inilah yang menjadi poin penting karena secara filosofi untuk mencapai suatu ranking atau posisi yang baik diperlukan *effort* lebih. Kecepatan pertumbuhan IPM merupakan salah satu indikator yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia.

Batam dengan Angka IPM Tertinggi di Kepulauan Riau

Sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau, Batam dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai suku, bangsa, agama, dan ras. Secara ekonomi, Batam merupakan pusat industri di wilayah Semenanjung Malaka yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi daya tarik Batam, penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia bahkan dari luar negeri berbondong-bondong ke Batam untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Tidaklah mengherankan jika sebutan kota metropolitan layak disandingkan oleh Batam. Selain itu, Batam juga menjadi penopang utama perekonomian Kepulauan Riau karena lebih dari separuh perekonomian Kepulauan Riau bersumber dari Batam.

Indeks Pembangunan Manusia Batam tahun 2023 mencapai 82,64 dan berstatus “sangat tinggi”. Tingginya IPM Batam didorong oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat masyarakat Batam yang sudah sangat baik. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang didekati oleh indikator UHH, dimana UHH Batam mencapai 74,98 Artinya penduduk Batam yang baru lahir pada tahun 2023 berpeluang untuk hidup sampai dengan 74,98 tahun

mendatang. Faktor pendorong tingginya IPM Batam yang kedua adalah dimensi pengetahuan, dimana rata-rata lama sekolah penduduk Batam mencapai 11,19 tahun dan angka harapan lama sekolah mencapai 13,34 tahun. Sebagian besar penduduk Batam telah sadar akan pentingnya tingkat pendidikan dan pemerintah daerah memberikan fasilitas pendidikan yang layak. Demikian halnya dengan dimensi standar hidup layak yang mengalami pertumbuhan positif. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Batam meningkat dari Rp. 18,51 juta per tahun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 18,99 juta per tahun pada tahun 2023. Capaian IPM Batam yang sudah baik dan harus dipertahankan agar pembangunan manusia tercapai secara merata di seluruh bidang kehidupan.

Lingga sebagai Kabupaten dengan IPM Terendah di Kepulauan Riau

Secara singkat, Kabupaten Lingga merupakan asal-usul kerajaan melayu yang ada di Johor-Pahang-Riau-Lingga. Sejarah melayu sangat kental terasa di Kabupaten Lingga. Pusat kerajaan berada di Kota Daik, maka tidak heran jika Kabupaten Lingga dijuluki Bunda Tanah Melayu. Secara geografis, Kabupaten Lingga berbatasan dengan Kota Batam dan Laut Natuna Utara di sebelah utaranya, kemudian sebelah selatan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala, sebelah barat dengan Laut Indragiri Hilir, Riau dan sebelah timur dengan Laut Natuna Utara. Kabupaten Lingga memiliki 13 kecamatan dengan luas total 2.216,04 km². Kabupaten Lingga terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Singkep dan Pulau Lingga.

Pemerintah Kabupaten Lingga terus melakukan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan IPM daerah Lingga. Meskipun IPM Kabupaten Lingga hingga saat ini masih menjadi yang terendah, namun percepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Lingga relatif tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau. Selama periode waktu 2020-2023, angka IPM Lingga mampu tumbuh sebesar 2,63 persen, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,87 persen. Bahkan dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan IPM Kabupaten Lingga adalah yang tercepat di antara kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau.

IPM Kabupaten Lingga tahun 2023 mencapai 72,23 dengan berstatus IPM “tinggi”. Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat mencapai 73,45 yang berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023 di Kabupaten Lingga memiliki peluang untuk hidup hingga 73,45 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 7,35 dan 12,63. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,35 diartikan bahwa penduduk Lingga yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 7,35 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 12,63 diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,63 tahun. Dari dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Lingga mencapai 12,485 juta rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau, pengeluaran per kapita Kabupaten Lingga adalah yang terendah.

Rata-rata Pertumbuhan IPM Karimun Relatif Tinggi di Kepulauan Riau

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari 256 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama dan hanya 57 pulau yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur.

Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status *Free Trade Zone* (FTZ) yang disandang Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Karimun pada tahun 2023 adalah sebesar 1,00 persen, yang merupakan pertumbuhan tercepat kedua setelah Kabupaten Lingga. Angka IPM Karimun mencapai 74,70 atau berstatus “tinggi”. Pada tahun 2023, pencapaian dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan, yaitu dari umur harapan hidup saat lahir penduduk Karimun sebesar 74,58 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan yang diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 8,69 tahun dan 12,61 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,69 tahun dapat diartikan bahwa penduduk Karimun yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 8,69 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah mencapai 12,61 tahun yang berarti bahwa penduduk berumur 7 tahun di Karimun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,61 tahun. Sementara dari dimensi standar hidup layak, Karimun mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen yaitu dari Rp.

12,31 juta per tahun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 12,76 juta per tahun pada tahun 2023.

Harapan Lama Sekolah di Tanjungpinang Tertinggi se-Kepulauan Riau

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pusat pemerintahan, Tanjungpinang memiliki fasilitas publik yang cukup memadai. Fasilitas publik tersebut digunakan sebagai alat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Mencapai kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan manusia secara menyeluruh. Pembangunan manusia di Tanjungpinang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program kerja pemerintah daerah di samping peningkatan ekonominya.

Angka IPM Tanjungpinang tahun 2023 mencapai 81,14 atau berstatus “sangat tinggi”. Tingginya pembangunan manusia di Tanjungpinang didorong oleh tingginya pencapaian dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan. Umur harapan hidup saat lahir penduduk Tanjungpinang sebesar 74,68 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan yang diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 10,65 tahun dan 14,15 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,65 tahun dapat diartikan bahwa penduduk Tanjungpinang yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 10,65 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah mencapai 14,15 tahun yang berarti bahwa penduduk berumur 7 tahun di Tanjungpinang memiliki peluang untuk bersekolah selama

14,15 tahun. Angka harapan lama sekolah di Tanjungpinang sebesar 14,15 merupakan yang tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Hal ini mengandung arti bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Tanjungpinang lebih layak dan memadai. Indikator penyusun angka IPM lainnya yakni pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Tanjungpinang tahun 2023 yang mencapai 16,213 juta rupiah per tahun. Indikator ini mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 2,20 persen jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 15,864 juta rupiah per tahun.

Pertumbuhan HLS Bintang tertinggi di Kepulauan Riau

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama “Paparasan Sunda”, wilayahnya membentang dari Semenanjung Malaysia bagian utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan. Bandar Seri Bintan merupakan ibukota Kabupaten Bintan.

Pada tahun 2023, pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan sebesar 0,91 persen. Yaitu dari 76,80 pada tahun 2022 menjadi 77,50 pada tahun 2023. IPM Kabupaten Bintan berstatus IPM “tinggi”. Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat mencapai 74,82, yang berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023 di Kabupaten Bintan memiliki peluang untuk hidup hingga 74,82 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 8,92 dan 13,44. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,92 diartikan bahwa penduduk Bintan yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal

selama 8,92 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 13,44 diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,44 tahun. Dari dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan mencapai 14,882 juta rupiah per tahun.

Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan terbesar dicapai oleh Natuna

Kabupaten Natuna terdapat sebanyak 159 pulau, dengan luas wilayah daratan 1.978,29 km². Ibukota Kabupaten Natuna adalah Kota Ranai.

IPM Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah 78,23 sehingga mempunyai status IPM “tinggi”. Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat mencapai 74,15, yang berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023 di Kabupaten Natuna memiliki peluang untuk hidup hingga 74,15 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 9,08 dan 13,93. Rata-rata lama sekolah sebesar 9,08 diartikan bahwa penduduk Natuna yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 9,08 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 13,93 diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,93 tahun. Dari dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Natuna mencapai 15,409 juta rupiah per tahun.

Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten dengan Peningkatan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Terbesar di Kepulauan Riau

Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah, dimana beberapa pulau tersebut berbatasan langsung dengan perairan Negara lain atau lautan internasional. Gugusan Kabupaten Kepulauan Anambas pernah menjadi pusat kawedanan pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang berpusat di Tarempa.

IPM Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 adalah 72,80 sehingga berstatus IPM “tinggi”, dengan pertumbuhan IPM dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,90 persen. Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat mencapai 73,50, yang berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peluang untuk hidup hingga 73,50 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 7,40 dan 13,05 Rata-rata lama sekolah sebesar 7,40 diartikan bahwa penduduk Anambas yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 7,40 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 13,05 diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun. Dari dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 12,495 juta rupiah per tahun, dimana nilainya paling rendah kedua setelah Kabupaten Lingga.

5

Profil Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

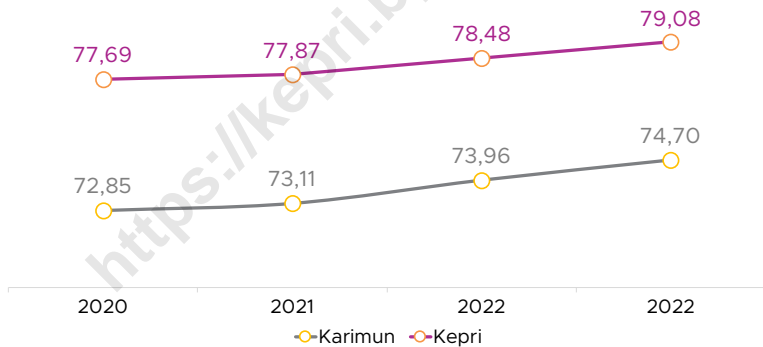
<https://kepri.bps.go.id>



Tabel 5.1 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Karimun, 2023

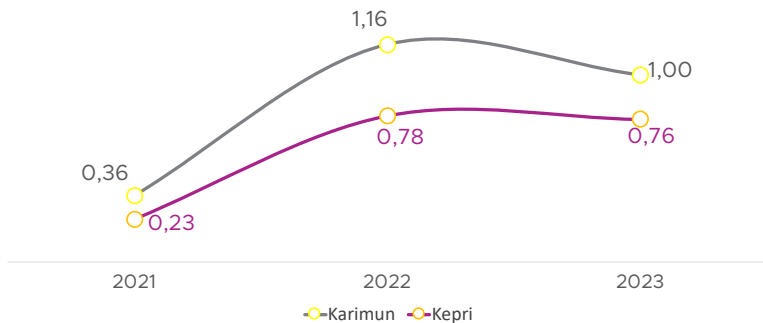
Indikator	Capaian	Pertumbuhan 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,58 tahun	0,20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,61 tahun	0,38
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,69 tahun	1,55
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 12.756 ribu	1,78

Sumber : Badan Pusat Statistik



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.1 Perkembangan IPM Kabupaten Karimun, 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.2 Pertumbuhan IPM Kabupaten Karimun 2021-2023 (persen)

Tabel 5.2 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Karimun, 2022–2023

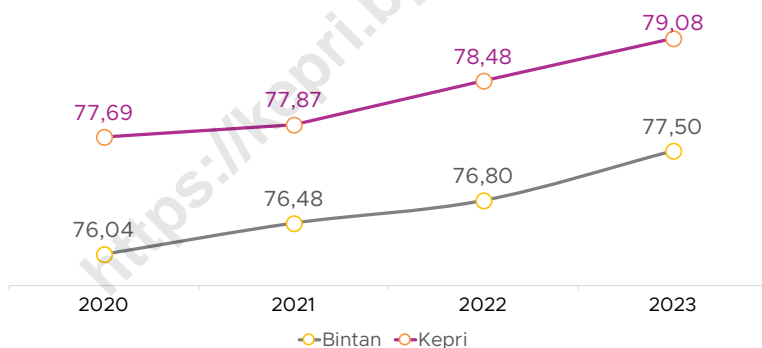
Indikator (1)	Satuan (2)	2022 (3)	2023 (4)	Selisih (5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	90,94	87,81	-3,13
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	85,19	87,91	2,72
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,07	0,18	0,11
Morbiditas	%	9,91	10,14	0,23
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	1,78	21,17	19,39
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	100	97,13	-2,87
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	100	100	0
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,33	99,28	-0,05
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,54	96,69	-0,85
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	77,10	76,92	-0,18
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	15.554,50	17.016,97	1.462,47
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	9.741,85	10.277,62	535,77
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	101.543	118.815	17.272
Persentase Pekerja Formal	%	55,05	62,40	7,35
Persentase Pekerja Informal	%	44,95	37,60	-7,35
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	3.538.914	3.836.892	297.978
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,87	6,02	-0,85
Penduduk Miskin	ribu jiwa	16,44	14,33	-2,11
Persentase Penduduk Miskin	%	6,87	5,95	-0,92
Gini Rasio	-	0,288	0,271	-0,017

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 5.3 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Bintan, 2023

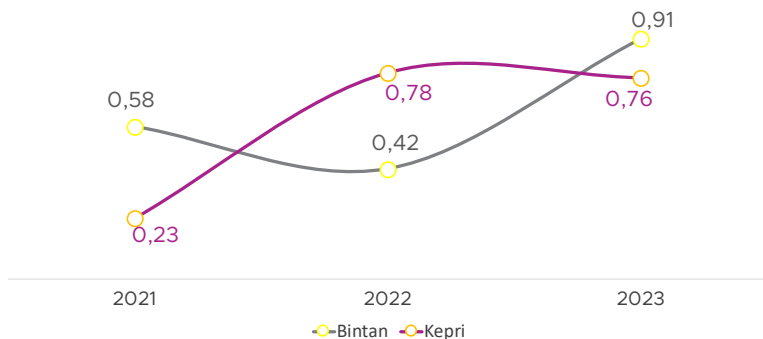
Indikator	Capaian	Pertumbuhan 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,82 tahun	0,15
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,44 tahun	0,64
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,92 tahun	1,39
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 14.882 ribu	0,68

Sumber : Badan Pusat Statistik



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.3 Perkembangan IPM Kabupaten Bintan, 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.4 Pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan, 2021-2023 (persen)

Tabel 5.4 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan, 2022–2023

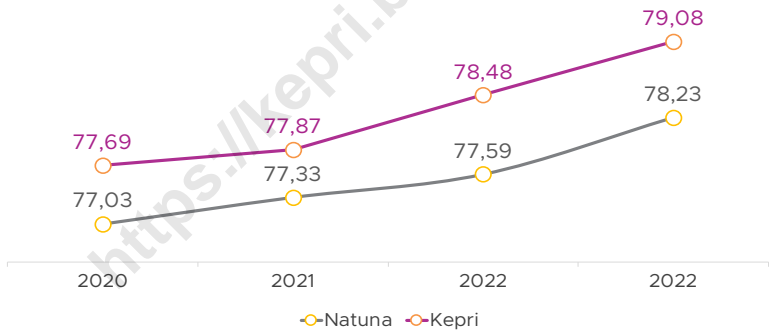
Indikator (1)	Satuan (2)	2022 (3)	2023 (4)	Selisih (5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	73,57	79,58	6,01
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	85,48	84,47	-1,01
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,20	1,41	1,21
Morbiditas	%	14,25	6,63	-7,62
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	18,91	19,90	0,99
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	96,64	95,83	-0,81
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	100	100	0
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,98	99,68	-0,30
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	99,60	99,95	0,35
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	92,70	92,54	-0,16
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	22.995,78	25.083,79	2.088,01
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	14.551,76	15.445,30	893,54
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	76.483	79.049	2.566
Persentase Pekerja Formal	%	61,05	66,03	4,98
Persentase Pekerja Informal	%	38,95	33,97	-4,98
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	3.444.703	3.544.651	99.948
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,91	5,43	-1,48
Penduduk Miskin	ribu jiwa	10,67	9,86	-0,81
Persentase Penduduk Miskin	%	6,44	5,90	-0,54
Gini Rasio	-	0,288	0,279	-0,009

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 5.5 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Natuna, 2023

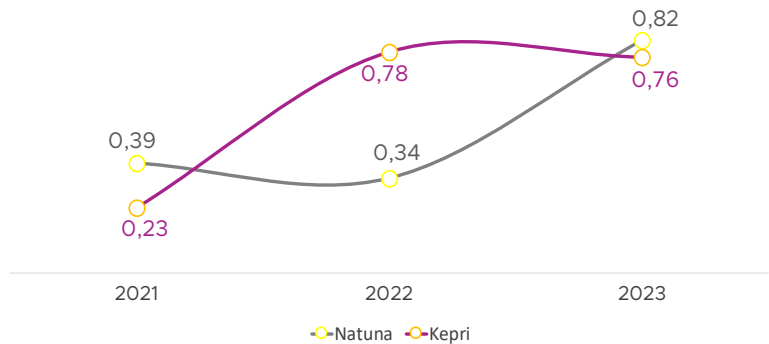
Indikator	Capaian	Pertumbuhan 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,15 tahun	0,20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,93 tahun	0,05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,08 tahun	0,99
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 15.409 ribu	1,18

Sumber : Badan Pusat Statistik



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.5 Perkembangan IPM Kabupaten Natuna, 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.6 Pertumbuhan IPM Kabupaten Natuna, 2021-2023 (persen)

Tabel 5.6 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna, 2022–2023

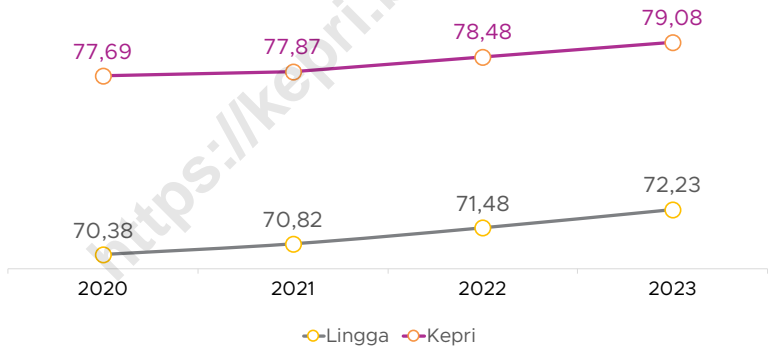
Indikator (1)	Satuan (2)	2022 (3)	2023 (4)	Selisih (5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	85,78	91,74	5,96
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	87,23	88,52	1,29
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	2,53	2,13	-0,40
Morbiditas	%	24,10	8,59	-15,51
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	33,92	31,73	-2,19
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	72,64	85,60	12,96
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	87,10	93,02	5,92
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,34	99,87	0,53
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	99,43	99,59	0,16
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	75,60	75,86	0,26
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	24.265,43	23.519,88	-745,55
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	14.661,78	14.801,85	140,07
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	38.927	42.912	3.985
Persentase Pekerja Formal	%	46,55	49,15	2,60
Persentase Pekerja Informal	%	53,45	50,85	-2,60
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	2.780.699	3.191.927	411.228
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,15	4,05	-0,10
Penduduk Miskin	ribu jiwa	4,32	4,30	-0,02
Persentase Penduduk Miskin	%	5,32	5,25	-0,07
Gini Rasio	-	0,291	0,309	0,018

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 5.7 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Lingga, 2023

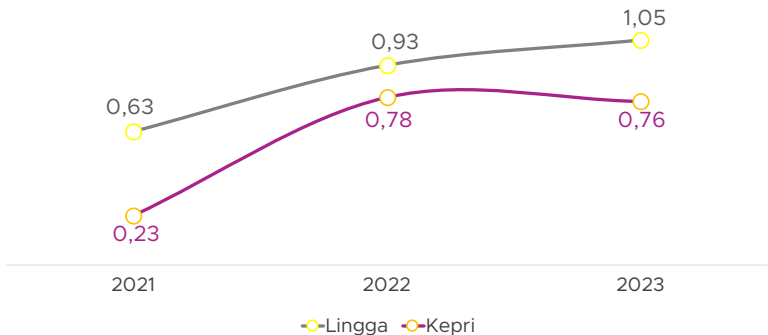
Indikator	Capaian	Pertumbuhan 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,45 tahun	0,26
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,63 tahun	0,36
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,35 tahun	2,46
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 12.485 ribu	1,00

Sumber : Badan Pusat Statistik



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.7 Perkembangan IPM Kabupaten Lingga, 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.8 Pertumbuhan IPM Kabupaten Lingga, 2021-2023 (persen)

Tabel 5.8 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Lingga, 2022-2023

Indikator (1)	Satuan (2)	2022 (3)	2023 (4)	Selisih (5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	79,97	76,37	-3,6
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	83,48	84,6	1,12
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	7,61	5,87	-1,74
Morbiditas	%	24,80	8,93	-15,87
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	24,73	23,88	-0,85
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	76,16	84,30	8,14
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	99,15	97,34	-1,81
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	98,63	98,52	-0,11
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	94,33	98,64	4,31
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	80,31	80,30	-0,01
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	4.852,61	5.249,76	397,15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	3.082,79	3.215,39	132,60
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	44.103	51.994	7.891
Persentase Pekerja Formal	%	42,63	47,02	4,39
Persentase Pekerja Informal	%	57,37	52,98	-4,39
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	2.754.632	2.970.017	215.385
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,09	3,52	0,43
Penduduk Miskin	ribu jiwa	12,70	10,18	-2,52
Persentase Penduduk Miskin	%	14,05	11,26	-2,79
Gini Rasio	-	0,277	0,326	0,049

Sumber : Badan Pusat Statistik

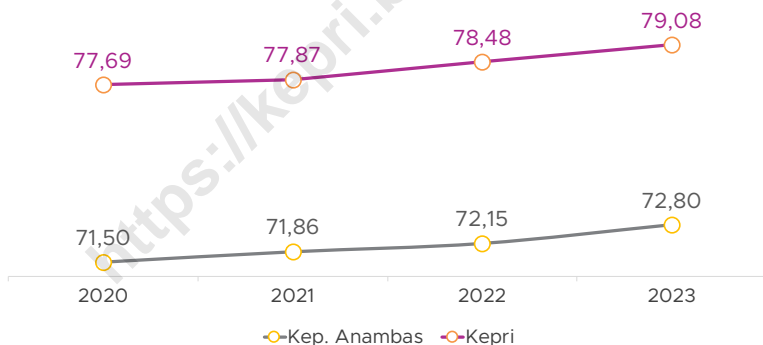
KEP. ANAMBAS

IPM 2023: **72,80** Status Pembangunan Manusia: **Tinggi**
 Pertumbuhan 2023: **0,90%** Rata-rata Pertumbuhan 2020-2023: **0,45%**

Tabel 5.9 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2023

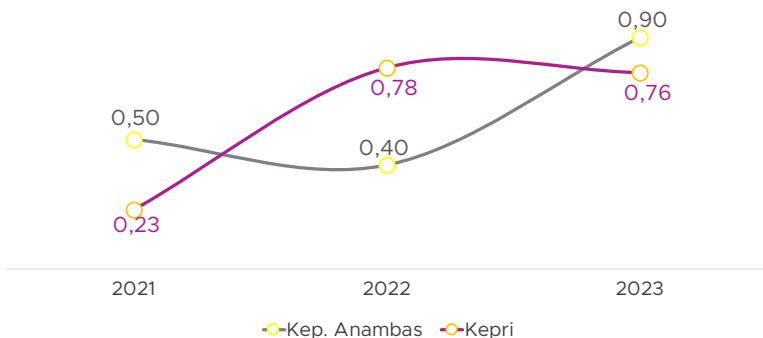
Indikator	Capaian	Pertumbuhan 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,50 tahun	0,18
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,05 tahun	0,47
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,40 tahun	0,79
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 12.495 ribu	1,28

Sumber : Badan Pusat Statistik



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.9 Perkembangan IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.10 Pertumbuhan IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2021-2023 (persen)

Tabel 5.10 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Kep. Anambas, 2022–2023

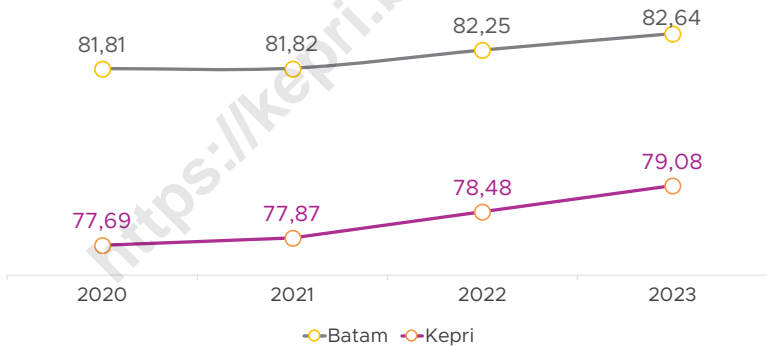
Indikator (1)	Satuan (2)	2022 (3)	2023 (4)	Selisih (5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	61,31	54,63	-6,68
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	28,56	28,96	0,40
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	2,04	0,45	-1,59
Morbiditas	%	8,68	5,91	-2,77
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	29,92	27,69	-2,23
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	78,07	83,14	5,07
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	97,67	93,43	-4,24
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,39	99,80	0,41
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,69	97,51	-0,18
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	88,25	88,36	0,11
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	19.909,09	19.241,49	-667,60
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	11.118,23	11.187,49	69,26
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	22.704	24.707	2.003
Persentase Pekerja Formal	%	44,14	53,88	9,74
Persentase Pekerja Informal	%	55,86	46,12	-9,74
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	3.892.824	3.358.241	-534.583
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,15	2,55	0,40
Penduduk Miskin	ribu jiwa	3,29	3,08	-0,21
Persentase Penduduk Miskin	%	7,51	6,95	-0,56
Gini Rasio	-	0,313	0,328	0,015

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 5.11 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM 2023

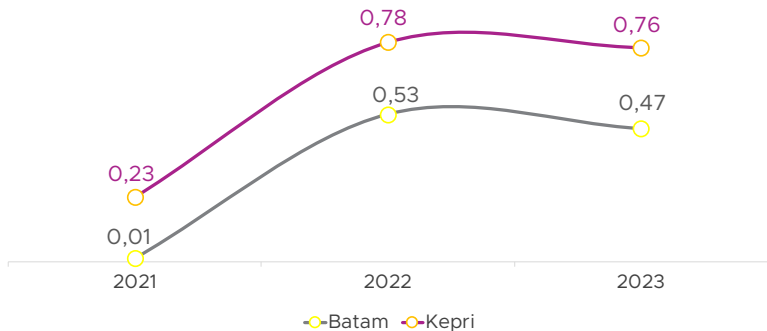
Indikator	Capaian	Pertumbuhan 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,98 tahun	0,08
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,34 tahun	0,34
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,19 tahun	0,11
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 18.990 ribu	1,21

Sumber : Badan Pusat Statistik



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.11 Perkembangan IPM Kota Batam, 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.12 Pertumbuhan IPM Kota Batam, 2021-2023 (persen)

Tabel 5.12 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kota Batam, 2022-2023

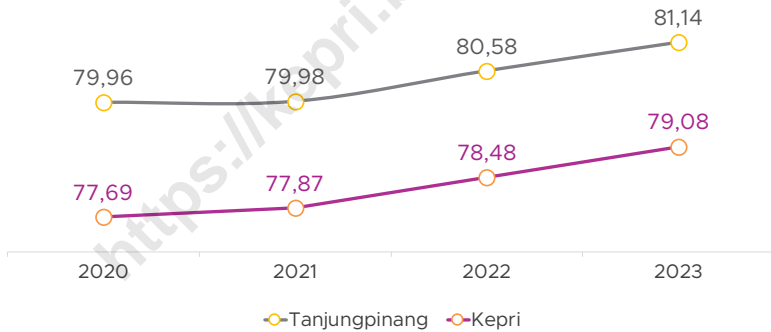
Indikator (1)	Satuan (2)	2022 (3)	2023 (4)	Selisih (5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	98,32	97,28	-1,04
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	95,34	95,94	0,60
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,64	0	-0,64
Morbiditas	%	5,93	9,43	3,50
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	11,03	13,33	2,30
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	98,23	99,17	0,94
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahirannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,23	99,00	0,77
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	99,21	99,22	0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	99,30	99,32	0,02
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	85,12	85,85	0,73
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	194.836,26	216.097,72	21.261,46
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	118.665,21	127.016,98	8.351,77
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	767.507	589.402	-178.105
Persentase Pekerja Formal	%	67,72	70,89	3,17
Persentase Pekerja Informal	%	32,28	29,11	-3,17
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	4.511.574	5.286.758	775.184
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,56	8,14	-1,42
Penduduk Miskin	ribu jiwa	82,59	83,08	0,49
Persentase Penduduk Miskin	%	5,19	5,02	-0,17
Gini Rasio	-	0,336	0,338	0,002

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 5.13 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kota Tanjungpinang, 2023

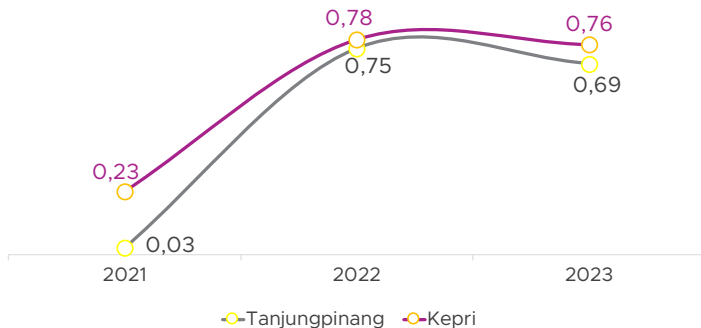
Indikator	Capaian	Pertumbuhan 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,68 tahun	0,16
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,15 tahun	0,05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,65 tahun	0,96
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 16.213 ribu	1,13

Sumber : Badan Pusat Statistik



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.13 Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang, 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.14 Pertumbuhan IPM Kota Tanjungpinang, 2021-2023 (persen)

Tabel 5.14 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kota Tanjungpinang, 2022–2023

Indikator (1)	Satuan (2)	2022 (3)	2023 (4)	Selisih (5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	77,71	87,62	9,91
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	93,35	93,77	0,42
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,64	0,16	-0,48
Morbiditas	%	5,20	8,20	3,00
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	15,27	14,15	-1,12
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	99,53	100	0,47
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	100,00	100	0
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,49	99,55	0,06
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	99,50	99,92	0,42
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	87,16	87,03	-0,13
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	21.792,47	23.533,66	1.741,19
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	14.597,57	15.316,10	718,53
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	104.730	112.477	7.747
Persentase Pekerja Formal	%	63,86	64,98	1,12
Persentase Pekerja Informal	%	36,14	35,02	-1,12
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	3.111.119	3.855.786	744.667
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,27	4,76	-0,51
Penduduk Miskin	ribu jiwa	21,67	17,67	-4,00
Persentase Penduduk Miskin	%	9,85	7,95	-1,90
Gini Rasio	-	0,347	0,339	-0,008

Sumber : Badan Pusat Statistik

Lampiran



Lampiran

Lampiran 1 *Sampling Error* Beberapa Indikator, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kesakitan					
Karimun	10,18	1,08	10,64	8,05	12,3
Bintan	6,56	0,82	12,44	4,96	8,16
Natuna	7,63	1,1	14,44	5,47	9,78
Lingga	10,08	1,21	12,03	7,7	12,45
Kep. Anambas	6,91	0,81	11,71	5,32	8,49
Batam	10,68	0,94	8,76	8,84	12,51
Tanjungpinang	8,68	1,09	12,51	6,55	10,81
Kepulauan Riau	9,99	0,64	6,41	8,73	11,24
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih					
Karimun	87,81	1,55	1,77	84,77	90,86
Bintan	79,58	2,25	2,82	75,17	83,99
Natuna	91,74	1,51	1,65	88,77	94,71
Lingga	76,37	2,18	2,86	72,09	80,65
Kep. Anambas	54,63	2,74	5,02	49,25	60,01
Batam	97,28	0,8	0,82	95,71	98,85
Tanjungpinang	87,62	1,73	1,97	84,23	91,01
Kepulauan Riau	92,27	0,61	0,66	91,08	93,46
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak					
Karimun	87,81	1,53	1,74	84,91	90,9
Bintan	84,47	2,01	2,38	80,54	88,41
Natuna	88,52	1,66	1,87	85,27	91,76
Lingga	84,6	1,74	2,05	81,19	88,01
Kep. Anambas	28,96	2,55	8,79	23,97	33,95

Lanjutan Lampiran 1

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Batam	95,94	0,89	0,93	94,19	97,68
Tanjungpinang	93,77	1,37	1,46	91,10	96,45
Kepulauan Riau	92,10	0,64	0,69	90,85	93,35
Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun					
Karimun	21,17	1,91	9,02	17,43	24,92
Bintan	19,9	2,13	10,72	15,72	24,09
Natuna	31,73	2,51	7,93	26,8	36,66
Lingga	23,88	2,14	8,96	19,69	28,08
Kep. Anambas	27,69	2,62	9,46	22,56	32,82
Batam	13,33	1,74	13,02	9,92	16,73
Tanjungpinang	14,15	1,72	12,17	10,77	17,52
Kepulauan Riau	16,07	1,15	7,14	13,82	18,31
Persentase Perempuan Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir di Fasilitas Kesehatan					
Karimun	97,13	2,34	2,41	92,54	101,72
Bintan	95,83	3,93	4,10	88,12	103,53
Natuna	85,60	5,77	6,75	74,29	96,92
Lingga	84,30	7,75	9,19	69,11	99,49
Kep. Anambas	83,14	7,74	9,31	67,97	98,31
Batam	99,00	0,85	0,86	97,32	100,67
Tanjungpinang	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kepulauan Riau	97,85	0,74	0,75	96,40	99,30
Persentase Perempuan Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Ditolong oleh Tenaga Kesehatan					
Karimun	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Bintan	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Natuna	93,02	3,52	3,78	86,12	99,91
Lingga	97,34	2,14	2,19	93,16	101,53
Kep. Anambas	93,43	6,23	6,67	81,21	105,64
Batam	99,00	0,85	0,86	97,32	100,67

Lanjutan Lampiran 1

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanjungpinang	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kepulauan Riau	98,92	0,63	0,64	97,68	100,16
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Informal Kelompok Umur 7–12 Tahun					
Karimun	99,28	0,43	0,43	98,44	100,13
Bintan	99,68	0,32	0,32	99,06	100,30
Natuna	99,87	0,13	0,13	99,62	100,12
Lingga	98,52	1,20	1,21	96,17	100,86
Kep. Anambas	99,80	0,14	0,14	99,53	100,08
Batam	99,22	0,46	0,46	98,31	100,12
Tanjungpinang	99,55	0,45	0,45	98,67	100,43
Kepulauan Riau	99,27	99,29	0,32	0,32	98,67
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Informal Kelompok Umur 13–15 Tahun					
Karimun	96,69	2,28	2,36	92,22	101,16
Bintan	99,95	0,05	0,05	99,84	100,05
Natuna	99,59	0,41	0,41	98,78	100,40
Lingga	98,64	1,35	1,37	95,99	101,29
Kep. Anambas	97,51	2,09	2,15	93,41	101,62
Batam	99,32	0,68	0,68	97,99	100,65
Tanjungpinang	99,92	0,08	0,08	99,75	100,08
Kepulauan Riau	99,01	99,07	0,50	0,51	98,09
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Informal Kelompok Umur 16–18 Tahun					
Karimun	76,92	5,39	7,01	66,35	87,49
Bintan	92,54	2,57	2,78	87,50	97,58
Natuna	75,86	5,28	6,96	65,51	86,20
Lingga	80,30	5,25	6,53	70,02	90,58
Kep. Anambas	88,36	4,27	4,84	79,98	96,73
Batam	85,85	4,03	4,69	77,96	93,74
Tanjungpinang	87,03	3,96	4,55	79,28	94,79
Kepulauan Riau	84,53	84,97	2,71	3,19	79,65

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Lampiran 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2020–2023

Kabupaten/ Kota	UHH (LF SP2020) (tahun)				UHH (LF SP2020) (tahun)				HLS (tahun)	
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kepulauan Riau	69,96	70,12	70,50	70,91	74,25	74,36	74,62	74,90	12,87	12,98
Karimun	70,91	71,11	71,53	72,01	73,99	74,17	74,37	74,58	12,42	12,57
Bintan	70,38	70,46	70,76	71,09	74,38	74,44	74,52	74,82	13,10	13,26
Natuna	65,06	65,31	65,76	66,22	73,57	73,65	73,90	74,15	13,90	13,91
Lingga	62,06	62,39	62,92	63,50	72,69	72,77	73,12	73,45	12,45	12,59
Kep. Anambas	67,21	67,36	67,73	68,10	72,98	72,98	73,13	73,50	12,81	12,88
Batam	73,33	73,36	73,62	73,94	74,73	74,76	74,78	74,98	13,16	13,17
Tanjungpinang	72,10	72,18	72,49	72,85	74,21	74,29	74,37	74,68	14,12	14,13

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/ Kota	HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)					
	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kepulauan Riau	12,99	13,05	10,12	10,18	10,37	10,41	14.209	14.122	14.469	14.998
Karimun	12,59	12,61	8,17	8,18	8,48	8,69	11.885	11.879	12.304	12.756
Bintan	13,27	13,44	8,44	8,67	8,70	8,92	14.482	14.393	14.739	14.882
Natuna	13,92	13,93	8,73	8,92	8,96	9,08	14.705	14.711	14.834	15.409
Lingga	12,61	12,63	6,67	6,88	7,12	7,35	11.998	11.938	12.134	12.485
Kep. Anambas	12,89	13,05	7,17	7,34	7,38	7,40	11.875	11.950	12.137	12.495
Batam	13,32	13,34	11,14	11,15	11,17	11,19	18.095	18.034	18.506	18.990
Tanjungpinang	14,14	14,15	10,25	10,26	10,49	10,65	15.498	15.439	15.864	16.213

Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	IPM (UHH SP2010)				IPM (UHH LF SP2020)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
Kepulauan Riau	75,59	75,79	76,46	77,11	77,69	77,87	78,48	79,08
Karimun	71,44	71,70	72,65	73,51	72,85	73,11	73,96	74,70
Bintan	74,13	74,57	74,99	75,70	76,04	76,48	76,80	77,50
Natuna	72,72	73,09	73,47	74,21	77,03	77,33	77,59	78,23
Lingga	65,29	65,83	66,57	67,44	70,38	70,82	71,48	72,23
Kep. Anambas	68,80	69,23	69,61	70,26	71,50	71,86	72,15	72,80
Batam	81,11	81,12	81,67	82,11	81,81	81,82	82,25	82,64
Tanjungpinang	78,91	78,93	79,64	80,23	79,96	79,98	80,58	81,14

Daftar Pustaka

- Alatas, S. H. (1977). *The myth of the lazy native: A study of the image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th century and its function in the ideology of colonial capitalism*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203043271/MYTH-LAZY-NATIVE-SYED-HUSSEIN-ALATAS>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2023). *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- Haq, M. U. (1995). *Reflections on human development*. <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=Cwyv2OtYdGQC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Reflections+on+Human+Development&ots=DN31nufBHQ&sig=7IGKm2RMMyEZBogrKFTNZWjpgD44>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=pBzVBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA525&dq=Development+as+Freedom&ots=TN_xgq6qq8&sig=kZwQhRx-V8LkGFjxJF20QlSyqA4
- UNDP. (2015). *Human Development Report 2015 Work for Human Development*. In Undp. https://www.in.undp.org/content/india/en/home/library/hdr/humandevlopment-products/GHDR2015.html%0Ahttp://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/CUB.pdf

- UNDP. (2016). Human Development Report 2016 Human Development for Everyone. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
- UNDP. (2018). Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update
- UNDP. (2022). Human Development Report 2021/2022. https://hdr.undp.org/system/files/documents/...report.../hdr2021-22pdf_1.pdf
- United Nation. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development, todaro smith - Google Scholar. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Economic+Development%2C+todaro+smith&btnG=&oq=Economic+Development%2C+todaro+sm
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--.html> (diakses 15 November 2023)
- <https://kepri.bps.go.id/pressrelease/2023/11/15/1457/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-kepulauan-riau-2023.html> (diakses 15 November 2023)

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. A. Yani No. 21 Tanjungpinang 29124
Telp: (0771) 4500155
Homepage: kepri.bps.go.id Email: bps2100@bps.go.id

